Jurnal Sejarah Indonesia
ISSN Print (2621-1580), ISSN Online (3032-4564)
Volume 9 Nomor 2 2026
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jsi

Perlawanan di Atas Kertas: Peran Pers sebagai Senjata Pergerakan Nasional Indonesia, 1908-1942

Kukuh Setyo Pambudi[1*]

[1]Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia
Email: setyokukuh612@gmail.com

[*]Korespondensi

Received: 09-06-2025, Revised: 28-10-2026, Accepted: 03-11-2026, Published: 30-11-2026

Abstrak

Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan tidak hanya berlangsung di medan perang, tetapi juga dilakukan melalui media cetak. Tulisan ini membahas bagaimana pers, khususnya surat kabar, menjadi alat perjuangan yang sangat penting dalam pergerakan nasional Indonesia pada tahun 1908–1942. Pers digunakan sebagai wadah menyuarakan ide-ide kebangsaan, mengkritik ketidakadilan kolonial, serta membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Tokoh seperti Tirto Adhi Soerjo melalui Medan Prijaji, menunjukkan bagaimana media dijadikan alat perjuangan yang cerdas dan strategis. Selain itu, pers juga menjadi penghubung antarorganisasi pergerakan seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, hingga PNI. Dalam kondisi tekanan dari pemerintah kolonial yang sering melakukan sensor dan pembredelan, pers nasional tetap mampu menyampaikan kritik dan semangat perjuangan melalui bahasa sindiran, satire, bahkan alegori. Penggunaan bahasa Melayu turut memperluas jangkauan pesan kepada masyarakat luas, sehingga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya kemerdekaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa pers bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana perjuangan ideologis yang membentuk identitas kebangsaan dan opini publik. Oleh karena itu, peran pers dalam sejarah pergerakan nasional tidak bisa dipisahkan dari proses terbentuknya kesadaran kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Kolonialisme; Kesadaran Kebangsaan; Pers Nasional; Pergerakan Nasional; Surat Kabar

Abstract

The struggle of the Indonesian nation against colonialism was fought not only on the battlefield but also through the print media. This paper examines how the press, particularly newspapers, served as a crucial instrument of struggle within the Indonesian national movement between 1908 and 1942. The press functioned as a medium for voicing nationalist ideas, criticizing colonial injustices, and fostering a spirit of nationalism among the populace. Figures such as Tirto Adhi Soerjo, through *Medan Prijaji*, demonstrated how media was employed as an intelligent and strategic tool of resistance. Furthermore, the press acted as a vital link connecting movement organizations, including Sarekat Islam, Budi Utomo, and the Indonesian National Party (PNI). Despite severe pressure from the colonial administration, which frequently imposed censorship and publishing bans, the national press successfully conveyed critiques and revolutionary resolve through satire, sarcasm, and allegory. The use of the Malay language expanded the reach of these messages across society, thereby nurturing a collective consciousness regarding the vital importance of independence. Utilizing a descriptive qualitative method with a literature study approach,

this study reveals that the press served not merely as a communication medium, but as an ideological vehicle shaping national identity and public opinion. Consequently, the role of the press in the history of the national movement is inextricably linked to the emergence of Indonesian national consciousness.

Keywords: Colonialism; National Consciousness; National Press; National Movement; Newspapers



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan tidak hanya berlangsung di medan tempur atau melalui aksi massa, tetapi juga terjadi secara intensif di atas lembaran kertas. Sejak awal abad ke-20, pers nasional memainkan peranan strategis sebagai sarana penyebaran ide-ide kebangsaan, kritik terhadap rezim kolonial, serta penggugah kesadaran kolektif rakyat (Ahmadin, 2017; Collins, 2021; Kusuma, 2026a). Kemunculan surat kabar *Medan Prijaji* (1907) yang digagas oleh Tirto Adhi Soerjo menjadi tonggak pergerakan pers sebagai wadah artikulasi politik kaum terpelajar bumiputera (Ahmadin, 2017). Melalui pers, sarana komunikasi massa terhubung secara erat dengan organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, hingga Partai Nasional Indonesia guna memobilisasi semangat anti-kolonial (Fauzi & Santosa, 2020). Meskipun diperhadapkan pada represi pemerintah kolonial Belanda melalui sensor, pembredelan, hingga pemenjaraan jurnalis, pers nasional mampu mengembangkan strategi perlawanan yang fleksibel dan cerdas melalui wacana terselubung maupun satire (Triharyanto, 2009; Izza, 2024).

Namun demikian, dinamika peran pers pada periode 1908–1942 belum sejalan dengan perlindungan dan ruang gerak yang ideal (Hutagalung, 2013). Pemerintah kolonial Hindia Belanda secara konsisten menerapkan regulasi pers yang represif (*Persdelicten* dan *Persteugels-ordonnantie*) untuk menekan narasi nasionalisme. Permasalahan utama dalam konteks sejarah ini terletak pada bagaimana pergerakan pers mampu mempertahankan eksistensinya sebagai instrumen mobilisasi massa dan pembentuk opini pro-kemerdekaan di tengah impitan aturan hukum yang ketat dan penyensoran yang amat ketat dari penguasa kolonial .

Kajian mengenai pers pergerakan nasional telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Ahmadin (2017) berfokus pada hubungan pertumbuhan pers dengan peningkatan kesadaran nasional. Fauzi dan Santosa (2020) meneliti pers sebagai alat komunikasi organisasi pergerakan, Mariana dan Hartati (2022) meneliti terkait perkembangan majalah Fikiran Ra'jat pada masa pergerakan nasional tahun 1932-1933, sedangkan Triharyanto (2009) serta Kusuma (2026b) menekankan aspek mekanisme kontrol kolonial dan respons pers melalui narasi satire. Sementara itu, Izza (2024) serta Andani dan Birsyada (2024) mengkaji efektivitas pers dalam merefleksikan dinamika sosial-politik serta membidani opini publik pro-kemerdekaan.

Meskipun studi-studi terdahulu telah memetakan fungsi pers secara umum sebagai alat perjuangan, sebagian besar literatur cenderung menempatkan pers sekadar sebagai media pelengkap sejarah pergerakan politik. Terdapat celah

akademis (*gap*) yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam, yaitu mengenai analisis strategi wacana dan dialektika teknis yang digunakan para jurnalis bumiputera dalam menyiasati sensor ketat pemerintah kolonial pada kurun 1908–1942. Keberbedaan dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada lokus kajiannya yang mendudukkan pers bukan hanya sebagai cermin peristiwa sejarah, melainkan sebagai aktor perlawanan ideologis independen yang memiliki taktik komunikasi terselubung secara spesifik dalam menghadapi represi rezim.

Berdasarkan permasalahan dan celah penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis pers nasional periode 1908–1942 sebagai tulang punggung perjuangan ideologis, sekaligus membongkar bentuk-bentuk strategi penyampaian wacana kritis kaum terpelajar bumiputera di tengah represi dan pembredelan oleh pemerintah kolonial.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya merekonstruksi kembali sejarah intelektual perjuangan kemerdekaan melalui kacamata media. Memahami cara pers masa kolonial mengartikulasi perlawanan dan menyatukan suara rakyat (Andani & Birsyada, 2024; Apriyani, 2022) memberikan kontribusi teoritis bagi historiografi pers Indonesia dan kajian komunikasi politik (Arnus, 2015), sekaligus memberikan historiografi kritis mengenai ketahanan pers dalam menyuarakan kebenaran di bawah tekanan otoriter.

Metode

Penelitian yang berfokus pada peristiwa masa lalu—seperti pergerakan pers nasional kurun 1908–1942—membutuhkan kerangka kerja metodologis khusus yang disebut metode penelitian sejarah (metode historis). Metode ini menjamin bahwa fakta yang direkonstruksi berlandaskan pada bukti-bukti dokumen zaman dahulu yang valid, kritis, serta teruji secara akademis.

Dalam metodologi sejarah, proses analisis diawali dengan tahap heuristik, yaitu perburuan dan pengumpulan sumber-sumber relevan. Peneliti mengumpulkan sumber primer berupa arsip surat kabar masa kolonial seperti *Medan Prijaji*, lembaran regulasi pers Hindia Belanda (*Persdelicten* dan *Persteugels-ordonnantie*), serta dokumen pergerakan. Sumber primer ini diperkuat oleh sumber sekunder yang mencakup literatur akademis dari para peneliti terdahulu (Ahmadin, 2017; Fauzi & Santosa, 2020; Triharyanto, 2009; Kusuma, 2026; Izza, 2024; Andani & Birsyada, 2024) yang diperoleh melalui studi pustaka.

Setelah data terkuak, peneliti tidak langsung menerimanya begitu saja, melainkan melakukan kritik sumber atau verifikasi. Pengujian dilakukan secara eksternal untuk menguji otentisitas fisik fisik dokumen dan kredibilitas penerbitnya, serta secara internal untuk memeriksa objektivitas isi wacana dan konsistensi informasi antar-dokumen (triangulasi sumber) (Gottschalk, 2015; Kuntowijoyo, 2013). Langkah ini memastikan bahwa kutipan atau narasi perlawanan dari para jurnalis bumiputera benar-benar autentik dan bebas dari kekeliruan sejarah.

Selanjutnya, data yang dinyatakan valid memasuki tahap interpretasi untuk dirangkai makna dan keterhubungannya secara kritis. Peneliti menafsirkan bagaimana pers pergerakan menggunakan taktik komunikasi terselubung dan satire untuk menerobos barikade sensor rezim kolonial. Seluruh rangkaian fakta dan penafsiran tersebut kemudian diakhiri dengan historiografi, yaitu penyajian

sintesis sejarah ke dalam narasi tertulis yang runtut, logis, dan analitis (Daliman, 2012; Sjamsuddin, 2012) untuk menjawab masalah utama penelitian secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Pers di masa pergerakan nasional Indonesia memainkan peranan penting sebagai medium komunikasi, edukasi, serta perlawanan terhadap hegemoni kolonial Belanda. Dalam periode 1908–1942, surat kabar dan media cetak menjadi alat perjuangan yang efektif bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk menyuarakan aspirasi kemerdekaan, membangun kesadaran nasional, serta memperkuat jaringan organisasi pergerakan. Pers tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga berubah menjadi senjata ideologis untuk menggugah semangat rakyat dan memperjuangkan keadilan sosial.

Salah satu tonggak awal penggunaan pers sebagai alat perjuangan dapat ditelusuri pada tokoh Tirto Adhi Soerjo melalui surat kabar Medan Prijaji. Surat kabar ini menjadi pionir dalam membentuk jurnalisme pribumi yang berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Tirto menggunakan media tersebut sebagai sarana membangkitkan kesadaran rakyat terhadap penindasan kolonial serta memperkenalkan gagasan-gagasan modern tentang keadilan dan kesetaraan (Suwirta, 1999).

Pada dekade-dekade selanjutnya, peran pers semakin meluas dan beragam. Surat kabar Fadjar Asia yang terbit di Bandung pada tahun 1930-an merupakan contoh nyata bagaimana media cetak dijadikan alat perjuangan politik. Dalam jurnal berjudul "Sikap Politik Surat Kabar Fadjar Asia", dijelaskan bahwa surat kabar ini secara aktif menyuarakan kritik terhadap kolonialisme Belanda, mendukung gagasan kemerdekaan, serta memobilisasi opini publik melalui tajuk rencana dan artikel yang bernada nasionalis (Prayogi & Darutama, 2022). Fadjar Asia bahkan secara tegas mendukung ide-ide progresif yang berorientasi pada perubahan sosial dan politik, sehingga menjadikannya sebagai alat agitasi yang penting bagi gerakan kemerdekaan.

Dalam konteks pergerakan nasional, pers berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi massa, tetapi juga sebagai "alat mobilisasi politik" yang efektif untuk menggalang dukungan rakyat dan menyebarluaskan visi organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI (Suwirta, 1999). Surat kabar seperti Soeara Oemoem, Tjahaja Timoer, hingga Pewarta Deli memainkan peran sebagai "organ perjuangan", tempat di mana para tokoh nasionalis menulis, berdiskusi, dan mengkritik kebijakan kolonial secara terbuka.

Lebih lanjut, dalam dokumen yang membahas perkembangan pers di Hindia Belanda, disebutkan bahwa surat kabar tidak hanya menjadi sarana penyebaran informasi, melainkan juga membentuk ruang diskusi publik yang kritis. Bahasa yang digunakan dalam media cetak pun dirancang sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai kalangan, mulai dari kaum terpelajar hingga rakyat biasa. Penggunaan bahasa Melayu yang populer, disertai dengan gaya penulisan yang lugas dan komunikatif, membuat media ini mampu membentuk "kesadaran kolektif" tentang pentingnya persatuan nasional.

Selain itu, keberadaan pers juga menjadi simbol perlawanan intelektual terhadap penjajahan. Dalam buku Pers dan Pergerakan Fadjar Asia, dikemukakan bahwa tulisan-tulisan di media cetak bukan sekadar laporan berita, melainkan

bentuk konkret dari perjuangan melawan penjajahan. Redaksi surat kabar sering kali harus menghadapi tekanan dan sensor dari pemerintah kolonial. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. "Perjuangan di atas kertas" melalui media cetak justru menjadi bentuk resistensi yang cerdas dan strategis.

Dengan demikian, pers dalam masa pergerakan nasional bukanlah entitas yang netral atau pasif. Ia merupakan bagian dari gerakan sosial-politik yang berperan penting dalam membentuk opini publik, membangun identitas nasional, serta memperkuat jaringan perjuangan antarkelompok nasionalis. Peran strategis pers ini menjadikannya sebagai salah satu instrumen kunci dalam dinamika perjuangan bangsa menuju kemerdekaan.

Peran Pers dalam Pergerakan Nasional

Secara historiografis, kemunculan pers pergerakan perlu ditempatkan dalam perubahan struktur komunikasi masyarakat kolonial, bukan hanya dalam kisah kepahlawanan individual para wartawan. Surat kabar tumbuh bersamaan dengan perkembangan sekolah, percetakan, perdagangan antarkota, dan mobilitas kelompok terdidik. Keempat kondisi tersebut saling berkaitan: sekolah menghasilkan pembaca dan penulis baru, percetakan memungkinkan reproduksi gagasan, jaringan perdagangan menopang distribusi, sedangkan mobilitas sosial menyediakan pengalaman ketidakadilan yang dapat diartikulasikan menjadi tuntutan politik. Adam (1995) menunjukkan bahwa pers vernakular berkembang dari berbagai orientasi sosial dan ekonomi menuju arena artikulasi kesadaran politik. Dengan demikian, pertumbuhan pers nasionalis bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba pada 1908, melainkan hasil dari akumulasi prasarana material dan perubahan sosial yang telah berlangsung sebelumnya.

Pembedaan antara pers pribumi, pers berbahasa Melayu, dan pers nasionalis juga penting untuk menghindari penyederhanaan. Ketiganya tidak sepenuhnya identik. Media berbahasa Melayu dapat dimiliki pengusaha dari latar etnis berbeda; pers yang dikelola bumiputra tidak selalu menyerukan kemerdekaan; sementara pesan antikolonial dapat muncul dalam publikasi yang beredar di luar lingkungan organisasi nasionalis formal. Temuan Hudiyanto (2007) mengenai pers Melayu dan komunitas Tionghoa di Malang mengingatkan bahwa pembentukan nasionalisme melibatkan pemilik modal, redaktur, dan jaringan pembaca yang lebih beragam daripada kategori etnis tunggal. Karena itu, keterlibatan Sin Po dalam naskah ini sebaiknya dibaca sebagai bukti bahwa ruang komunikasi kebangsaan dibentuk melalui negosiasi lintas komunitas, bukan sebagai tanda bahwa semua komunitas telah memiliki orientasi politik yang seragam (Mahiyar, 2023).

Dalam kasus *Medan Prijaji*, arti penting Tirto Adhi Soerjo dapat dianalisis melalui perubahan posisi subjek dalam pemberitaan. Penduduk bumiputra tidak hanya ditampilkan sebagai objek keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki pengalaman, keluhan, dan hak untuk menuntut penjelasan. Perubahan ini bersifat politis meskipun tidak semua artikelnya berbentuk seruan kemerdekaan. Ketika praktik administratif yang sebelumnya dianggap persoalan setempat diangkat menjadi berita yang dapat dibaca publik luas, muncul kemungkinan untuk membandingkan pengalaman ketidakadilan di berbagai wilayah. Proses perbandingan inilah yang memungkinkan keluhan individual

memperoleh makna kolektif. Namun, untuk menilai dampak langsungnya, diperlukan data mengenai tiras, langganan, surat pembaca, dan respons aparat; naskah yang tersedia belum menyajikan rangkaian data tersebut.

Kaitan pers dengan organisasi pergerakan juga bersifat timbal balik. Organisasi membutuhkan media untuk menyebarkan program, tetapi media sekaligus dapat memengaruhi pilihan isu yang dibicarakan oleh organisasi. Pemberitaan rapat, polemik antarredaktur, serta penjelasan mengenai pendidikan dan ekonomi menyediakan kosakata politik yang dapat dipakai anggota di berbagai daerah. Hubungan ini tidak berarti surat kabar hanya berfungsi sebagai corong resmi. Redaktur memiliki kepentingan, pembaca dapat mengajukan tanggapan, dan perbedaan pandangan antarkelompok dapat menjadi bagian dari isi terbitan. Oleh sebab itu, penelitian sejarah pers perlu membandingkan sikap editorial dengan dinamika organisasi dan menghindari anggapan bahwa satu artikel otomatis mencerminkan suara seluruh anggota suatu gerakan.

Subijanto (2017a; 2017b) menawarkan pembacaan yang lebih khusus melalui penelitian tentang Sinar Hindia dan pers revolusioner pada 1920–1926. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa surat kabar tidak sekadar melaporkan gerakan, tetapi berpartisipasi dalam pembentukan proyek pendidikan politik dan perubahan sosial. Pembedaan antara pers vernakular secara umum dan pers revolusioner membantu menjelaskan variasi tingkat radikalisme. Sebagian media lebih menekankan pembaruan pendidikan dan martabat masyarakat, sedangkan yang lain menggunakan bahasa perjuangan kelas serta kritik struktural terhadap kolonialisme (Akbar, 1997). Variasi ini penting bagi periodisasi 1908–1942 karena perubahan orientasi media mengikuti pergeseran kesempatan politik, perkembangan organisasi, dan tindakan represif negara kolonial.

Dari sudut sejarah komunikasi, bahasa Melayu tidak hanya mempermudah penyebaran pesan, tetapi juga menyediakan medium bersama untuk menyusun persoalan yang melampaui ikatan kedaerahan. Pilihan bahasa mencakup keputusan mengenai istilah politik, sapaan kepada pembaca, dan bentuk argumentasi yang dianggap mudah dipahami. Steedly (1996), melalui penelitian mengenai bahasa dan identitas di Tanah Karo kolonial, menunjukkan bahwa praktik bahasa dan percetakan dapat membentuk kategori identitas lokal sekaligus berhubungan dengan komunitas nasional yang sedang berkembang. Temuan tersebut berguna sebagai pembanding: perluasan bahasa pergaulan antardaerah tidak serta-merta menghapus identitas setempat. Justru, gagasan kebangsaan dapat beredar melalui pertemuan, persaingan, dan penerjemahan antara bahasa serta identitas yang berbeda.

Perlu pula memperhatikan aspek ekonomi politik media. Penerbitan membutuhkan kertas, mesin cetak, tenaga redaksi, biaya pengiriman, dan sumber pemasukan. Ketergantungan pada iklan, langganan, sumbangan, atau dukungan organisasi dapat membatasi sekaligus membuka peluang bagi redaksi. Surat kabar dengan jaringan pendanaan yang lemah mungkin sulit mempertahankan kesinambungan terbit meskipun memiliki pesan politik yang kuat. Karena itu, keberhasilan pers pergerakan seharusnya tidak diukur hanya melalui keberanian tajuk rencana, tetapi juga melalui kemampuan membangun infrastruktur produksi dan pembaca. Hudiyanto (2007) menegaskan pentingnya peran pemilik modal dalam sejarah pers dan nasionalisme; implikasinya, studi yang berpusat hanya pada

tokoh penulis berisiko mengabaikan aktor ekonomi di belakang kelangsungan sebuah surat kabar.

Jika kerangka ruang publik diterapkan, pers kolonial sebaiknya tidak diperlakukan sebagai satu forum terbuka yang setara bagi seluruh penduduk. Hunter dan James (2020) mengusulkan perhatian terhadap siapa yang disapa oleh suatu terbitan, bagaimana teks melakukan tindakan politik, apa kondisi material produksinya, serta bagaimana ritme penerbitannya membentuk interaksi publik. Kerangka ini memungkinkan pembacaan lebih teliti terhadap surat kabar yang disebutkan dalam naskah. Misalnya, surat kabar harian dan majalah organisasi mungkin berbeda dalam kecepatan merespons peristiwa, sasaran pembaca, serta ketergantungan pada jaringan aktivis. Perbedaan bentuk media itu berpotensi menghasilkan bentuk mobilisasi yang berbeda pula, sehingga generalisasi mengenai 'pers nasionalis' harus selalu diuji terhadap karakter setiap terbitan.

Pada awal abad ke-20, saat bangsa Indonesia belum memiliki negara tetapi sudah menyimpan cita-cita kemerdekaan, pers tampil sebagai salah satu ujung tombak perjuangan yang tak kalah penting dari senjata fisik. Surat kabar, majalah, dan buletin menjadi medium strategis bagi tokoh-tokoh pergerakan untuk menyuarakan ide, menggugah kesadaran, dan membentuk identitas nasional yang sedang tumbuh. Dalam konteks ini, pers bukan hanya menjadi alat informasi, tetapi juga sebagai arena diskusi publik dan alat propaganda anti-kolonial yang efektif.

Salah satu tokoh awal yang memahami potensi besar pers sebagai alat perjuangan adalah Tirto Adhi Soerjo. Ia mendirikan Medan Prijaji, yang bisa dibilang merupakan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi dan ditujukan kepada pembaca bumiputera. Dalam surat kabar ini, Tirto secara konsisten menyoroti ketidakadilan sistem kolonial, mengangkat isu-isu rakyat kecil, dan mendorong munculnya kesadaran kelas di kalangan bumiputera. Medan Prijaji merupakan cikal bakal pers perjuangan yang berhasil menggabungkan kepentingan jurnalistik dan politik secara efektif untuk menyemai benih nasionalisme (Sitorus, 2023).

Tidak berhenti di situ, perkembangan pers pun melibatkan kelompok-kelompok etnis lain yang ada di Hindia Belanda. Salah satu contoh yang menonjol adalah surat kabar Sin Po, yang dikelola oleh komunitas Tionghoa peranakan (Mahiyar, 2023). Meskipun pada awalnya fokus pada isu komunitas sendiri, Sin Po perlahan-lahan menunjukkan keterlibatan aktif dalam wacana kebangsaan. Sin Po bukan hanya memberikan ruang bagi ide-ide kemerdekaan, tetapi juga berkontribusi penting dalam penyebaran simbol kebangsaan, seperti saat mereka pertama kali menerbitkan syair lagu Indonesia Raya. Bahkan istilah “Indonesia” mulai digunakan secara konsisten dalam halaman-halaman surat kabar ini, menjadikan Sin Po sebagai pelopor dalam membentuk semangat kebangsaan lintas etnis (Aprianto, 2022).

Di sisi lain, peran pers juga sangat kental dalam mendukung organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, Muhammadiyah, dan Taman Siswa. Melalui media cetak yang mereka kelola sendiri ataupun melalui media sekutu, gagasan-gagasan pembaruan dan pendidikan nasional disebarluaskan ke berbagai penjuru negeri. Pers turut menjadi alat penting dalam memperkuat basis massa dan memperluas pengaruh organisasi-organisasi ini. Surat kabar organisasi tidak hanya menjadi alat komunikasi internal, tetapi juga

menjadi sarana penting untuk membentuk opini publik tentang nasionalisme dan pentingnya pendidikan sebagai jalan menuju kemerdekaan (Izza, 2024).

Dalam periode 1908–1942, banyak surat kabar dan majalah bermunculan, dari yang berbahasa Belanda, Melayu, hingga Jawa. Semua ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme masyarakat akan informasi dan betapa kuatnya kebutuhan untuk memiliki ruang diskusi sendiri di luar dominasi kolonial. Pers menjadi saluran penting bagi organisasi dan tokoh pergerakan untuk menegaskan identitas politik mereka, menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial, serta memperkenalkan gagasan tentang persatuan bangsa dan cita-cita kemerdekaan yang sejati.

Keunggulan pers dalam memperjuangkan ide-ide perlawanan terletak pada sifatnya yang bisa menjangkau banyak kalangan—mulai dari elite terdidik hingga rakyat biasa (Indrakrista, 2015). Dengan gaya bahasa yang kadang lugas dan kadang menggugah, surat kabar berhasil menyentuh sisi emosional pembacanya dan membentuk opini kolektif tentang perlunya kemerdekaan. Pers menjadi medan tempur yang sunyi namun berpengaruh besar, karena dari sinilah narasi-narasi kebangsaan dibentuk, diperdebatkan, dan disebarkan ke masyarakat luas.

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pers memainkan peran yang sangat vital dalam pergerakan nasional Indonesia (Wahyuni & Mursal, 2022). Ia menjadi "senjata pena" yang melengkapi perjuangan fisik dan politik. Pers membentuk opini publik, memperkuat identitas nasional, serta menyatukan beragam kelompok sosial dan etnis dalam satu visi: Indonesia merdeka. Tanpa pers, barangkali pergerakan nasional tidak akan memiliki gaung sebesar itu, dan kesadaran kolektif rakyat akan pentingnya kemerdekaan tidak akan tumbuh secepat dan sekuat yang terjadi kala itu.

Reaksi Pemerintah Kolonial terhadap Pers Nasionalis

Hubungan pers dengan kekuasaan kolonial perlu dipahami sebagai hubungan yang berubah dari waktu ke waktu. Pemerintah kolonial menghadapi dilema: kegiatan cetak diperlukan untuk administrasi, perdagangan, pendidikan, dan penyebaran informasi, tetapi saluran yang sama dapat digunakan untuk mengkritik ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, pengendalian pers tidak selalu mengambil bentuk pelarangan menyeluruh. Instrumen hukum, pengawasan aparat, tekanan ekonomi, dan tindakan terhadap penulis tertentu dapat digunakan secara berbeda sesuai keadaan politik. Analisis ini menghindari gambaran bahwa negara kolonial memiliki satu kebijakan yang tidak berubah sepanjang 1908–1942. Perubahan perangkat pengawasan perlu dilacak melalui peraturan dan kasus konkret pada tiap periode, bukan disimpulkan hanya dari adanya beberapa tokoh pers yang dihukum.

Represi juga memiliki dimensi selektif. Risiko hukum dapat berbeda menurut bahasa terbitan, tempat percetakan, jaringan politik, dan isi tulisan. Kategori seperti 'menghasut' atau 'mengganggu ketertiban' memberi ruang bagi aparat untuk menafsirkan kritik politik sebagai ancaman keamanan. Namun, tidak semua pembatasan dapat disamakan dengan sensor sebelum terbit; pengawasan isi, penuntutan setelah publikasi, penyitaan, dan pembatasan izin memiliki prosedur serta konsekuensi yang berbeda. Karena naskah awal menyebut sensor terhadap artikel sebelum terbit, klaim tersebut memerlukan pembuktian lebih spesifik melalui dokumen peraturan atau arsip kasus. Pembedaan mekanisme represif ini

penting agar penjelasan mengenai kebijakan kolonial tetap akurat secara hukum dan kronologis.

Tekanan negara turut memengaruhi praktik penulisan. Satire, alegori, ironi, dan pemilihan istilah dapat berfungsi sebagai strategi komunikasi di bawah pengawasan, tetapi tidak setiap penggunaan gaya bahasa kiasan membuktikan adanya sensor. Gaya retoris juga dapat dipilih karena tradisi sastra, selera pembaca, atau persaingan antarmedia. Untuk menguji hubungan sebab-akibat, peneliti dapat membandingkan teks sebelum dan sesudah tindakan represif, menelaah surat redaksi, serta memeriksa catatan pengadilan atau peringatan aparat. Dengan cara demikian, kreativitas jurnalistik tidak hanya dipuji secara normatif, melainkan dijelaskan melalui bukti perubahan praktik redaksional. Pendekatan ini juga membuka kemungkinan bahwa represi terkadang mengurangi jangkauan pers, bukan selalu memperkuat militansi sebagaimana disimpulkan secara umum dalam naskah awal.

Perubahan tekanan kolonial dapat dianalisis bersama transformasi jaringan pergerakan pada 1920-an dan 1930-an. Ketika organisasi politik menghadapi penangkapan, pembatasan, atau perpecahan, media mungkin mengalami pergantian redaktur, perubahan bahasa kritik, dan penyesuaian strategi distribusi. Dalam penelitian Subijanto (2017b), isi, produksi, serta distribusi Sinar Hindia dianalisis sebagai satu kesatuan; pendekatan serupa dapat digunakan untuk menilai dampak represi terhadap surat kabar lain. Artinya, persoalan utamanya bukan sekadar apakah sebuah media berani mengkritik, melainkan bagaimana ia mempertahankan keberadaan, menjangkau pembaca, dan mengubah orientasi editorial ketika ruang politik menyempit.

Dalam pembacaan yang lebih luas, praktik sensor menunjukkan bahwa kolonialisme tidak hanya mengatur wilayah dan tenaga kerja, tetapi juga berusaha menentukan batas pernyataan yang dianggap sah di ruang publik. Pembatasan atas informasi berpengaruh terhadap siapa yang boleh mengkritik pejabat, mengungkap penderitaan, dan menafsirkan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, kontrol negara tidak pernah bekerja dalam ruang kosong; ia berhadapan dengan pembaca, jaringan organisasi, penerbit komersial, serta perbedaan pandangan di antara kelompok kolonial sendiri. Hunter dan James (2020) menekankan sifat berlapis dari ruang publik kolonial, sehingga respons negara sebaiknya dilihat sebagai proses negosiasi kekuasaan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi hasilnya.

Klaim bahwa represi 'tidak berhasil membungkam' pers perlu diperhalus. Keberlanjutan beberapa surat kabar atau kemunculan media baru memang menunjukkan adanya daya tahan, tetapi penutupan penerbitan, hilangnya pendapatan, dan pemenjaraan redaktur tetap dapat menghasilkan kerugian besar bagi sirkulasi gagasan. Penilaian yang lebih proporsional ialah bahwa tindakan represif membatasi sebagian saluran komunikasi sekaligus mendorong sebagian pelaku mencari bentuk komunikasi alternatif. Untuk mengukur besarnya kedua dampak tersebut, dibutuhkan perbandingan jumlah terbitan, frekuensi penerbitan, dan dokumentasi kasus penindakan pada periode yang sama. Tanpa data kuantitatif dan arsip pendukung, hubungan antara represi dan meningkatnya nasionalisme sebaiknya dinyatakan sebagai kemungkinan interpretatif, bukan kesimpulan kausal yang telah terbukti.

Dalam menghadapi geliat pers nasionalis yang kian kritis dan vokal terhadap kebijakan kolonial, pemerintah Hindia Belanda tidak tinggal diam. Otoritas kolonial menyadari kekuatan pers dalam membentuk opini publik serta menggalang kesadaran nasional. Maka dari itu, mereka merespons dengan berbagai cara represif guna membatasi ruang gerak media bumiputra yang dinilai membahayakan stabilitas kekuasaan kolonial.

Salah satu bentuk reaksi paling nyata adalah pemberlakuan berbagai regulasi pers yang ketat. Seperti dijelaskan oleh Suwirta (1999), pemerintah kolonial mengandalkan pasal-pasal dalam Het Regeeringsreglement serta Persdelict untuk menjerat para jurnalis dan redaktur yang dianggap subversif. Undang-undang ini memungkinkan aparat untuk membubarkan penerbitan, menangkap penulis, bahkan memenjarakan mereka tanpa proses hukum yang adil.

Penindasan ini tidak hanya berupa regulasi formal, tetapi juga praktik pengawasan yang intensif terhadap media massa. Disebutkan bahwa setiap surat kabar pribumi selalu berada dalam pengawasan ketat oleh Hoofdbureau van Politie. Bahkan, sensor terhadap artikel yang belum terbit kerap dilakukan secara diam-diam agar berita-berita yang dianggap membahayakan tidak sempat beredar. Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap pers nasionalis sering kali dilakukan secara sewenang-wenang. Terdapat berbagai kasus di mana tokoh-tokoh pers seperti Tirto Adhi Soerjo dan Marco Kartodikromo harus menjalani hukuman penjara atau pengasingan karena tulisan-tulisan mereka dianggap menentang pemerintah kolonial. Padahal, tulisan mereka hanya berisi kritik terhadap ketidakadilan sistem kolonial (Daraquthny, 2018).

Reaksi keras pemerintah kolonial ini rupanya juga berdampak pada strategi media nasionalis. Mereka mulai menggunakan gaya bahasa sindiran, satire, hingga alegori untuk menyampaikan pesan-pesan perjuangan secara tersamar. Surat kabar nasionalis seperti Medan Prijaji, Sinar Hindia, dan Pewarta Deli tetap berusaha menyuarakan aspirasi rakyat meskipun berada dalam tekanan dan risiko tinggi (Arditya, 2023).

Dalam banyak hal, tekanan dari pemerintah kolonial justru menyuburkan semangat perlawanan di kalangan pers nasionalis. Surat kabar menjadi lebih dari sekadar media informasi, melainkan senjata perjuangan yang ampuh. Semakin represif sikap kolonial, semakin kreatif pula bentuk perlawanan pers nasionalis—baik dalam bentuk tulisan, ilustrasi, maupun penyelundupan makna. Dengan demikian, reaksi pemerintah kolonial yang keras terhadap pers nasionalis tidak berhasil membungkam suara-suara perlawanan. Justru, tindakan represif tersebut menjadi bahan bakar bagi lahirnya semangat jurnalistik yang lebih militan dan berani, mengukuhkan peran penting pers dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia.

Dampak Pers dalam Membangun Kesadaran Nasional

Kesadaran nasional dalam konteks ini sebaiknya dipahami sebagai proses historis bertahap, bukan keadaan psikologis yang serentak muncul pada seluruh penduduk. Pembaca dapat mulai mengenali kesamaan pengalaman kolonial tanpa segera menyepakati program politik tertentu. Mereka juga mungkin mempertahankan identitas keagamaan, kedaerahan, dan etnis ketika mulai menggunakan istilah kebangsaan. Dengan demikian, pers menyediakan sarana

untuk menghubungkan pengalaman yang semula terpisah, tetapi tidak dapat dianggap sebagai penyebab tunggal lahirnya nasionalisme. Pendidikan, migrasi, organisasi sosial, perubahan ekonomi, dan pengalaman diskriminasi tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan bersama media cetak.

Pengaruh pers dapat ditelaah melalui tiga tahapan analitis, yakni penyebaran informasi, pembentukan kerangka penafsiran, dan kemungkinan tindakan kolektif. Pada tahap pertama, berita memungkinkan pembaca mengetahui peristiwa di luar lingkungan terdekatnya. Pada tahap kedua, tajuk rencana serta artikel opini menawarkan penjelasan tentang sebab suatu ketidakadilan dan pihak yang dianggap bertanggung jawab. Pada tahap ketiga, wacana yang telah beredar dapat dimanfaatkan oleh organisasi dalam rapat, petisi, atau kegiatan pendidikan. Namun, perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya tidak otomatis terjadi. Adanya berita nasionalis tidak dengan sendirinya membuktikan perubahan sikap pembaca, terlebih jika belum tersedia surat pembaca, laporan rapat, atau sumber lain yang memperlihatkan respons masyarakat.

Temuan Hudiyanto (2007) mengenai Malang memperluas pengertian agen pembentukan kesadaran nasional. Identitas kebangsaan bukan hanya dibangun oleh elite organisasi, melainkan juga melalui keterlibatan komunitas pembaca dan pengusaha pers dari latar sosial berbeda. Ini relevan dengan pembahasan Sin Po dalam naskah: partisipasi media komunitas Tionghoa dapat memperluas ruang perdebatan mengenai kebangsaan, tetapi posisi politik setiap redaksi dan komunitas perlu dibedakan. Kesadaran nasional bukan hasil penyeragaman total, melainkan proses pembentukan titik temu di tengah kepentingan yang kadang berseberangan. Perspektif ini lebih mampu menjelaskan nasionalisme Indonesia sebagai proyek yang terus dinegosiasikan daripada sebagai kesepakatan yang telah lengkap sejak awal abad kedua puluh.

Dimensi bahasa sangat penting dalam proses tersebut. Pilihan bahasa Melayu memungkinkan gagasan beredar melintasi komunitas yang tidak selalu berbagi bahasa ibu. Akan tetapi, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan baca, biaya memperoleh terbitan, dan praktik pembacaan bersama. Sebuah koran dapat didengar oleh orang yang tidak membacanya sendiri ketika isinya dibacakan dalam pertemuan atau lingkungan sosial, meskipun praktik semacam itu perlu dibuktikan secara khusus untuk kasus yang diteliti. Penelitian Steedly (1996) mengenai hubungan bahasa, pendidikan, dan identitas di Tanah Karo memperlihatkan bahwa bahasa cetak turut membentuk batas-batas komunitas politik. Karena itu, nasionalisasi bahasa tidak seharusnya dilihat semata sebagai penyebaran kosakata, tetapi sebagai perubahan cara masyarakat membayangkan hubungan antara tempat asal dan komunitas yang lebih luas.

Pers juga memengaruhi pengalaman waktu politik. Penerbitan berkala memungkinkan pembaca mengikuti rangkaian peristiwa sebagai cerita yang berkesinambungan: kebijakan pemerintah, tanggapan organisasi, polemik redaksi, dan perkembangan suatu tuntutan. Keteraturan ini dapat menciptakan kesadaran bahwa orang-orang di tempat berbeda sedang menyaksikan persoalan bersama pada masa yang sama. Hunter dan James (2020) menyebut periodisitas sebagai salah satu unsur penting untuk memahami publik yang dibentuk media cetak. Dalam konteks Hindia Belanda, analisis terhadap frekuensi terbit, rubrik berita daerah, serta kesinambungan isu akan membantu menjelaskan bagaimana keterhubungan

antardaerah diproduksi melalui rutinitas jurnalistik, bukan hanya melalui pernyataan nasionalisme yang eksplisit.

Sementara itu, pengaruh media tidak selalu berupa penguatan persatuan. Polemik tentang strategi organisasi, hubungan agama dengan politik, persoalan kelas, dan posisi komunitas etnis dapat menampilkan perbedaan tajam di dalam masyarakat kolonial. Pers memungkinkan perbedaan itu dipublikasikan, diperdebatkan, dan kadang dipertajam. Dari sudut sejarah nasionalisme, perdebatan tersebut bukan bukti kegagalan pers, melainkan bagian dari proses pembentukan bahasa politik modern. Kesadaran nasional dapat tumbuh melalui perselisihan mengenai siapa yang termasuk dalam komunitas bangsa, apa tujuan perjuangan, dan cara apa yang dianggap sah untuk mencapainya. Karena itu, kajian terhadap artikel polemis sama pentingnya dengan kajian tajuk rencana yang menyerukan persatuan.

Dalam periodisasi 1908–1942, perubahan hubungan antara pers dan nasionalisme juga perlu dibaca secara dinamis. Pada fase awal, media menyediakan ruang bagi pendidikan politik dan kritik administratif; pada fase perkembangan organisasi massa, ia menjadi sarana penghubung jaringan dan perdebatan ideologi; sedangkan pada periode pengetatan pengawasan, sebagian redaksi menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan strategi. Periodisasi ini merupakan kerangka interpretatif yang masih perlu diuji terhadap tanggal terbit, arsip surat kabar, dan kebijakan kolonial yang spesifik. Nilainya terletak pada kemampuan menjelaskan perubahan fungsi pers, bukan mengasumsikan bahwa intensitas nasionalisme terus meningkat secara linear hingga 1942.

Kontribusi utama pembahasan ini ialah memandang pers sebagai infrastruktur sosial bagi pembentukan kesadaran nasional. Infrastruktur tersebut mencakup teknologi cetak, pembiayaan, tenaga redaksi, jaringan distribusi, praktik membaca, pilihan bahasa, dan relasi dengan organisasi. Gagasan kebangsaan tidak hanya berada dalam isi tulisan, tetapi juga terbentuk melalui hubungan sosial yang memungkinkan tulisan diproduksi, diedarkan, dibaca, dan diperdebatkan. Kerangka ini sejalan dengan perhatian Adam (1995) terhadap perkembangan pers vernakular serta Subijanto (2017b) terhadap hubungan antara isi, produksi, dan distribusi media revolusioner. Dengan demikian, pers dipahami sebagai salah satu kondisi penting bagi artikulasi nasionalisme, tanpa meniadakan peran faktor sosial dan politik lain.

Terdapat pula keterbatasan bukti yang harus diakui. Naskah awal menyebut sejumlah media, tokoh, dan interpretasi sekunder, tetapi belum menyediakan korpus surat kabar yang dianalisis secara sistematis, jumlah edisi yang diperiksa, maupun metode pengodean tema pemberitaan. Oleh karena itu, uraian mengenai dampak pada rakyat luas lebih tepat dibaca sebagai sintesis historiografis daripada pengukuran langsung perubahan opini publik. Penelitian lanjutan dapat menyusun sampel edisi dari beberapa surat kabar pada tahun yang sama, mengelompokkan tema pendidikan, ekonomi, hak politik, dan identitas, lalu membandingkan perubahan diksi serta respons pemerintah. Langkah itu akan memperkuat pengujian hubungan antara pesan pers dan dinamika pergerakan nasional.

Secara keseluruhan, bukti dan literatur yang dibahas mendukung penilaian bahwa pers menyediakan arena penting bagi pembentukan serta perundingan gagasan kebangsaan di Hindia Belanda. Namun, peran tersebut bekerja melalui

proses yang tidak merata dan tidak selalu menghasilkan kesepakatan politik. Kekuatan pers terletak pada kemampuannya mempertemukan pengalaman lokal dengan wacana antarkota, membuka ruang kritik terhadap kolonialisme, dan menyediakan perangkat bahasa bagi identifikasi kolektif. Kesimpulan ini lebih terukur daripada menyatakan bahwa kemerdekaan atau nasionalisme terutama dihasilkan oleh pers, karena transformasi politik juga bergantung pada organisasi, pendidikan, mobilisasi masyarakat, dan perubahan situasi kolonial.

Peran pers dalam membangkitkan kesadaran nasional pada masa pergerakan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari dinamika perjuangan melawan kolonialisme. Melalui tulisan-tulisan yang terbit di berbagai surat kabar dan majalah, semangat nasionalisme secara perlahan tetapi pasti tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia. Pers menjadi medium edukasi, advokasi, sekaligus alat agitasi yang mampu menjangkau lintas kelas dan golongan masyarakat.

Pers bumiputra seperti Medan Prijaji, yang didirikan oleh Tirto Adhi Soerjo, merupakan salah satu pelopor dalam membangun opini publik dan menyuarakan keprihatinan kaum pribumi atas ketidakadilan kolonial. Surat kabar ini menyentuh berbagai isu penting, seperti ketimpangan sosial, korupsi pejabat pribumi, dan kekejaman aparat kolonial. Dalam konteks ini, pers bukan hanya sebagai penyampai berita, tetapi juga instrumen perlawanan intelektual yang mengedukasi rakyat akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Menurut Mahmud Chaniago, "Media cetak menjadi instrumen strategis dalam menyuarakan penderitaan rakyat serta menggugah kesadaran kolektif untuk bangkit melawan ketertindasan" (Chaniago, 2021).

Selain itu, pers juga menjadi sarana komunikasi antarorganisasi pergerakan yang saat itu mulai bermunculan. Tokoh-tokoh seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat menggunakan media untuk memperkuat solidaritas nasional. Artikel-artikel mereka yang bernada tajam dan penuh semangat menyalakan api perjuangan di tengah tekanan politik. Pers "menjadi ruang diskursif di mana gagasan-gagasan nasionalisme diperbincangkan dan disebarluaskan, bahkan hingga ke pelosok".

Menariknya, dalam konteks ini, penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca dalam berbagai surat kabar membantu memperluas jangkauan pesan nasionalisme. Surat kabar seperti Sin Po dan Bintang Timoer turut serta menyebarkan ide-ide kebangsaan tidak hanya ke kalangan terpelajar, tetapi juga ke rakyat kebanyakan. Seperti disebutkan dalam dokumen Fadjar Asia, bahasa menjadi "alat perekat yang memungkinkan berbagai golongan etnis dan sosial terhubung dalam satu semangat perlawanan yang sama" (Arditya, 2022).

Tak hanya dalam hal isi, keberanian pers bumiputra dalam menghadapi sensor kolonial juga patut dicatat. Meski banyak media yang dibredel, namun semangat perlawanan tetap tumbuh subur. Hal ini terlihat dari bagaimana pers menjelma menjadi 'medan pertempuran' ideologis antara pemerintah kolonial dan kaum pergerakan. Surat kabar menjadi tempat di mana narasi kolonial dilawan dengan narasi kebangsaan yang kuat dan argumentatif. Sebagaimana dicatat dalam studi oleh Syamsuddin (2022), "Pers menjadi ladang subur bagi lahirnya tokoh-tokoh intelektual pergerakan yang kelak memainkan peran penting dalam kemerdekaan Indonesia".

Lebih lanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya akses masyarakat terhadap media cetak turut membentuk identitas kolektif bangsa. Surat kabar seperti Oetoesan Hindia dan De Express menjadi media pembentukan imajinasi kebangsaan (*imagined community*), tempat di mana orang-orang dari latar belakang berbeda mulai merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama (Kosasih, 2013). Melalui pers, ide tentang 'Indonesia' mulai terbentuk dalam benak masyarakat jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan. Dengan demikian, peran pers dalam membangun kesadaran nasional tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga transformasional (Efendi et al., 2023). Pers menjadi medan perlawanan kultural dan ideologis, yang membentuk landasan intelektual bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa di balik setiap gerakan besar, selalu ada suara-suara yang disuarakan di atas kertas—tajam, menggugah, dan penuh semangat merdeka.

Kesimpulan

Pergerakan nasional Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan bangsa menuju kemerdekaan. Melalui pembentukan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, hingga Perhimpunan Indonesia, tampak bahwa kesadaran nasional mulai tumbuh di kalangan rakyat Indonesia, terutama kaum intelektual dan pelajar. Organisasi-organisasi tersebut menjadi wadah awal munculnya semangat persatuan, kesadaran identitas kebangsaan, dan perlawanan terorganisir terhadap penjajahan.

Dari hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pergerakan nasional tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari proses panjang yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman organisasi, dan situasi politik global. Munculnya golongan terpelajar bumiputera yang memperoleh akses pendidikan barat menjadi faktor penting dalam membentuk pola pikir kritis terhadap ketidakadilan kolonial dan menumbuhkan semangat perubahan sosial.

Permasalahan dalam pembelajaran sejarah selama ini adalah kurangnya pendekatan yang menyentuh aspek reflektif dan kontekstual. Materi sering kali hanya disampaikan sebagai kumpulan tanggal dan nama, tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai perjuangan dan relevansi dengan kondisi saat ini. Untuk itu, dibutuhkan perbaikan dalam metode pembelajaran sejarah, yaitu dengan menekankan pemahaman kritis, pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), dan penguatan narasi-narasi lokal yang terhubung dengan sejarah nasional.

Implikasi dari kajian ini adalah bahwa sejarah pergerakan nasional bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dijadikan inspirasi dalam membentuk karakter generasi muda yang cinta tanah air, berpikir kritis, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Pengajaran sejarah seharusnya mendorong siswa untuk memahami bahwa perjuangan kemerdekaan adalah hasil dari kerja kolektif yang penuh pengorbanan, dan nilai-nilainya masih sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Sebagai gagasan perbaikan, guru sejarah dapat mengembangkan model pembelajaran kolaboratif yang mengajak siswa untuk meneliti tokoh-tokoh pergerakan nasional di daerah masing-masing. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar sejarah dari buku, tetapi juga membangun kedekatan emosional dan rasa bangga terhadap akar sejarah bangsanya sendiri.

Referensi

Adam, A. B. (1995). *The vernacular press and the emergence of modern Indonesian consciousness (1855–1913)*. Cornell University Press. https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1nhp5c.

Ahmadin, A. (2017). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.

Akbar, A. Z. (1997). Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia. *Unisia*, *32*(4), 44-51. https://doi.org/10.20885/unisia.v0i32.5857.

Andani, A. A., & Birsyada, M. I. (2024). Perkembangan Pers Indonesia Sebagai Identitas Bangsa. *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, *4*(2), 599-613. https://doi.org/10.30998/je.v4i2.2720.

Aprianto, I. D. (2022). Tjoe Bou San, Nasionalis Tionghoa dan Redaktur Sin Po. *Patrawidya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, *23*(2), 121-144.

Apriyani, R. A. (2022). Pengaruh Djamaluddin Adinegoro Dalam Perkembangan Pers Masa Kolonial Belanda (1932-1942). *SEUNEUBOK LADA: Jurnal ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, *9*(2), 175-181. https://doi.org/10.33059/jsnbl.v10i2.5733.

Arditya, P. (2023). *Pers dan Pergerakan: Membaca Sikap Politik Surat Kabar Fadjar Asia 1927-1930.* Mitra Ilmu.

Arditya, P., & Ardiyan, D. (2022). Sikap politik surat kabar fadjar asia: Respon politis atas isu pergerakan nasional 1927-1930. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, *12*(2), 154-168. https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.9656.

Arnus, S. H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *Jurnal Al-Munzir*, *8*(1), 103-113. https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-munzir/article/view/770.

Chaniago, D. M., & Humairah, U. R. (2019). Pers dan Perubahan Sosial di Sumatera Barat Awal Abad Ke-XX. *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 14-30. https://doi.org/10.15548/khazanah.v0i0.186.

Collins, J. S. (2021). Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *2*(2), 142-173. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.25.

Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Daraquthny, F. A., & MASSA, P. K. (2018). *Tirto Adhi Soerjo (Studi Deskriptif Pemikiran Perintis Pers Pribumi pada Masa Kolonialisme Hindia-Belanda).* Skripsi. Universitas Brawijaya.

Efendi, E., Nasution, M. H., Purba, U. H., Az-zahra, S. F., Ritonga, K., & Reindra, K. (2023). Peran Pers dalam Membangun Negara dan Daerah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *3*(5), 8156-8170. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5830.

Fauzi, A., & Santosa, H. (2020). Pers sebagai instrumen komunikasi politik organisasi pergerakan nasional Indonesia (1908-1927). *Jurnal Kebangsaan dan Sejarah*, 9(2), 112-125.

Fauzi, W. I., & Santosa, A. B. (2020). Kehidupan sosial budaya masa pergerakan nasional di Indonesia (1900-1942) dari sudut pandang novel sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, *3*(2), 187-196. https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.21675.

Gottschalk, L. (2015). *Mengerti Sejarah* (Penerj. Nugroho Notosusanto). Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Hudiyanto, R. (2007). Pahlawan yang terlupakan: Pers Melayu, etnik Thionghoa, dan nasionalisme di Kota Malang 1920–1950. *Humaniora, 19*(3), 215-223. https://doi.org/10.22146/jh.905.

Hunter, E., & James, L. (2020). Introduction: Colonial public spheres and the worlds of print. *Itinerario, 44*(2), 227–242. https://doi.org/10.1017/S0165115320000248.

Hutagalung, I. (2013). Dinamika sistem pers di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *2*(2), 156-163.

Indrakrista, N. B. (2015). Pers mengawal demokrasi daerah: Analisis pemberitaan implementasi dana keistimewaan di harian tribun jogja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, *18*(3), 196-209.

Izza, D. N. F. (2024a). Peran Media Pers Dalam Pembentukan Opini Publik Dimasa Demokrasi Liberal dan Terpimpin. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, *1*(3), 1-8. https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.137.

Kosasih, A. (2013). Pers Tionghoa dan dinamika pergerakan nasional di Indonesia, 1900–1942. *SUSURGALUR*, *1*(1), 41-60. https://doi.org/10.2121/susurgalur.v1i1.55.

Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.

Kusuma, A. R. (2026a). *Agitasi, Propaganda, dan Pers Pergerakan: Dinamika Wacana Perlawanan Masa Hindia Belanda*. Pustaka Sejarah Indonesia.

Kusuma, Y. M. (2026b). Propaganda dan Perlawanan: Pers, Kekuasaan Kolonial dan Perlawanan Pribumi. *Journal of Law and Society*, *1*(1), 77-94. https://journal.goufpublisher.com/index.php/lexsociety/article/view/25.

Mahiyar, F. A. (2023). Sin Po: Peran pers Tionghoa dalam mendukung pergerakan nasional Indonesia 1925-1930. *Historiography: Journal of Indonesian History and Education*, *3*(2), 154-161. https://doi.org/10.17977/um081v3i12023p154-161.

Mariana, R., & Hartati, U. (2022). Perkembangan Majalah Fikiran Ra'jat Pada Masa Pergerakan Nasional Tahun 1932-1933. *SwarnaDwipa*, *4*(3), 121-129.

Prayogi, A., & Darutama, A. (2022). Sikap politik surat kabar fadjar asia: Respon politis atas isu pergerakan nasional 1927-1930. *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, *12*(2), 154-168. https://doi.org/10.25273/ajsp.v12i2.9656.

Sitorus, M. S. M. (2023). Surat Kabar Medan Prijaji: Media Aspirasi Rakyat Pribumi dan Pemantik Kesadaran Edukasi. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, *3*(2), 1-10. https://doi.org/10.22437/jejak.v3i2.24811.

Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.

Steedly, M. M. (1996). The importance of proper names: Language and "national" identity in colonial Karoland. *American Ethnologist, 23*(3), 447–475. https://doi.org/10.1525/ae.1996.23.3.02a00010.

Subijanto, R. (2017a). Enlightenment and the revolutionary press in colonial Indonesia. *International Journal of Communication, 11*. 1357–1377. https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5159.

Subijanto, R. (2017b). Verlichtingsidealen en de revolutionaire pers in koloniaal Indonesië: De inhoud, productie en distributie van Sinar Hindia. *Tijdschrift voor Geschiedenis, 130*(3), 449–466. https://doi.org/10.5117/TVGESCH2017.3.SUBI.

Suwirta, A. (1999). Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia. *Majalah Pendidikan, 4,* 82-94.

Triharyanto, B. (2009). *Pers Perlawanan, Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan*. LKIS Pelangi Aksara.

Wahyuni, B., & Mursal, I. F. (2022). Analisis masa pergerakan nasional Indonesia 1908-1942. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, *2*(1), 54-67. https://doi.org/10.22437/js.v2i1.18742.